

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada bab IV, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemandirian daerah kabupaten/kota pemekaran di provinsi Sumatera Barat selama tahun 2009-2013 selalu mengalami fluktuasi. Jika dilihat secara keseluruhan, daerah kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Sumatera Barat memiliki rasio kemandirian yang sangat rendah, yaitu 6,05%. Sehingga dikategorikan sebagai daerah yang memiliki pola hubungan instruktif, yaitu daerah yang masih memiliki ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat atau sumber dana eksternal untuk membiayai pelaksanaan program pemerintahan daerah.
2. Efektivitas penerimaan PAD secara rata-rata selama tahun 2009-2013 pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Sumatera Barat dikategorikan tidak efektif. Dan jika dilihat dari perbandingan tingkat efektivitas pada daerah kabupaten dan daerah perkotaan, maka daerah kota memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi daripada daerah kabupaten secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 2009-2013, pemerintah daerah kota lebih memiliki kinerja yang baik dalam penerimaan PAD yang tercermin pada tingkat efektivitas penerimaan PAD nya.
3. *Growth* PAD tahun 2009-2013 pada Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Sumatera Barat juga mengalami fluktuasi, bahkan ada yang memiliki *growth* PAD yang negatif pada tahun berjalan seperti Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Solok Selatan. Namun ada dua daerah yang memiliki rasio *growth* PAD yang selalu positif walaupun persentasinya masih naik

turun dari tahun ketahun, yaitu Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Pariaman. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah daerah tersebut mampu untuk mempertahankan bahkan meningkatkan penerimaan PAD dari periode ke periode berikutnya, meskipun cenderung masih sangat rendah.

4. *Share* PAD kabupaten/kota Pemekaran di Provinsi Sumatera Barat dalam membiayai belanja daerah selama tahun 2009-2013 berfluktuasi. Secara rata-rata tingkat rasio *share* PAD terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Sumatera Barat adalah 5,16%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Barat pada periode tersebut hanya mampu menutupi belanja daerahnya menggunakan PAD sebesar 5,16%.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan-keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Objek penelitian terbatas hanya pada kabupaten/kota pemekaran yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
2. Penelitian ini terbatas pada pengamatan data APBD dan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 2009-2013.
3. Penelitian ini juga terbatas pada penggunaan analisis rasio keuangan berupa rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas penerimaan PAD, rasio *growth* PAD, dan rasio *share* PAD terhadap belanja daerah.

5.3 Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Sumatera Barat
 - a. Rendahnya kinerja keuangan daerah kabupaten/kota dari segi kemandirian daerah, maka direkomendasikan kepada pemerintah daerah lebih

memperhatikan untuk mengoptimalkan penerimaan sumber pendapatan yang ada bahkan dengan menambah sumber pendapatan baru, seperti mengembangkan dan mengefektifkan objek pariwisata, sumber daya alam dan lainnya sesuai tujuan dari pelaksanaan wilayah pemekaran yang nantinya akan berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

- b. Dengan rendahnya rata-rata efektivitas penerimaan PAD di kabupaten/kota pemekaran, maka direkomendasikan pada pemerintah daerah agar lebih meningkatkan kinerja seperti meningkatkan target penerimaan sehingga lebih memotivasi dalam menggali sumber penerimaan PAD.

2. Kepada Masyarakat di Kabupaten/Kota Pemekaran

- a. Agar tumbuh kesadaran dalam hati masyarakat dalam membayarkan pajak, sehingga akan bertambahnya penerimaan daerah dari sektor pajak.
- b. Tumbuh kesadaran masyarakat pada pentingnya pendidikan, sehingga nanti banyak menghasilkan sumber daya manusia lokal yang berkualitas.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitiannya dengan beberapa provinsi yang menjadi populasinya.
- b. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator penilaian kinerja keuangan daerah yang lebih kompleks, seperti rasio efisiensi, rasio aktivitas, kontribusi, DSCR, dan lain-lain.